

Dinamika Politik Islam Di Indonesia

¹Surpani, ²Rumadi

Surpanisurpani2@gmail.com

¹ Universitas Nahdatul Ulama Indonesia. Jakarta

Correspondance: Surpanisurpani2@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	A B S T R A C T
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima Redaksi: 05 Juni 2023 Revisi Akhir: 03 Juli 2023 Diterbitkan Online: Agustus 2023</p> <p>KEYWORDS</p>	<p>Islam as the majority religion of Indonesian society has experienced development from time to time. In 2024 a General Election will be held to determine the President of Indonesia for the next five years. The aim of this article is to review the dynamics and development of Islamic politics in Indonesia. The research method is descriptive qualitative with secondary data sources, namely relevant research from journals and books as well as data documentation that strengthens this article. The data analysis technique uses triangulation techniques. The results of the article show that the opposition party uses this motive to fight party control. On the other hand, the incumbent party collaborates with Ulama from the largest Islamic organization in Indonesia. Media wars, arguments, and even insults are very easily thrown out by two parties competing to win the election, ironically the use of the words "party of Satan and party of God" was thrown out by a well-respected figure. Indonesia is not a religious country. Meanwhile, the relationship between religion and the state in Indonesia can be seen from religious institutions, laws and regulations related to religion or religious life, and other policies related to religious life.</p>
<p><i>Dynamics, Politics, Islamic Politics</i></p>	
<p>KORESPONDENSI</p>	
<p>No HP:-</p>	
<p>E-mail: Surpanisurpani2@gmail.com</p>	
	<p><i>Keywords: Dynamics, Politics, Islamic Politics</i></p>
	<p>A B S T R A K</p>
	<p>Islam sebagai mayoritas agama masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Umum untuk menentukan Presiden Indonesia lima tahun ke depan. Tujuan Tulisan ini ialah meninjau kembali dinamika dan perkembangan politik islam di Indonesia metode penelitian ialah Kualitatif Deskriptif dengan sumber data Sekunder yaitu penelitian-penelitian yang relevan baik dari jurnal dan buku serta data dokumentasi yang memperkuat tulisan ini. Teknik analisis data menggunakan teknik Triangulasi. Hasil Tulisan menunjukkan Partai oposisi menggunakan motif ini untuk melawan partai penguasa. Di lain pihak partai petahanan menggandeng Ulama dari organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Perang media, argumen, bahkan hingga caci-maki sangat mudah terlontar dari dua pihak yang bersaing demi memenangkan pemilu, ironisnya penggunaan kata "partai setan dan partai tuhan" sempat telontar dari seorang tokoh yang cukup dihormati. Indonesia bukanlah negara agama. Sedangkan keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakanlain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan</p> <p>Kata Kunci: Dinamika, Politik, Politik Islam</p>



Pendahuluan

Islam sebagai agama mayoritas Indonesia mengalami perkembangan dari masake masa. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam.

Kendati mayoritas penduduk beragama Islam, negara ini bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru, Indonesia adalah sebuah Negara sekuler demokratik tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam.

Namun, karena ada puluhan juta penduduk non-Muslim berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan pemilihan-pemilihan selama era Reformasi, partai-partai Islam konservatif justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Berdasarkan fenomena akhir tahun 2016, sebagian muslim Indonesia telah terkonsumsi oleh kasus penistaan agama oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang juga dikenal sebagai Ahok. Setelah

tekanan yang memuncak dari para Islamis garis eksklusif yang menggelar demonstrasi massal terhadapnya, Ahok diadili atas sebuah pernyataan yang dia ucapkan pada pertengahan Oktober 2017 yang dianggap menghina al-Qur'an. Kasusnya telah memicu kekhawatiran tentang semakin berkembangnya suara Islam eksklusif di Indonesia dan ancaman yang bisa ditimbulkan terhadap reputasi moderasi dan toleransi Islam di Indonesia.

Berawal pada September tahun 2016, Buni Yani mengunggah potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta, Basuki (Ahok) Tjahaja Purnama saat di Kepulauan Seribu. Video dengan transkrip tersebut yang menjadi awal dari kasus Surah Al-Maidah ayat 51 yang di tuduhkan sebagai penistaan agama kepada Ahok. Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengklarifikasi potongan video yang di unggah Buni dengan video berisi pidato lengkap Ahok saat kunjungan tersebut.

Sebagian umat muslim tetap merasa bahwa kata-kata Ahok menistakan agama Islam dan ayat suci Al-Qur'an. Puncaknya pada tanggal 4 November dan tanggal 2 Desember tahun 2016, ribuan bahkan jutaan orang turun ke jalan menuntut Gubernur petahana DKI Jakarta itu di tuntutan mundur dan di hukum karena di anggap telah melukai hati umat Islam. Demo berjilid menjelang Pilkada DKI Jakarta itu selalu mengatasnamakan untuk membela agama. Namun dapat dipahami bahwa isu itu dimanfaatkan habis oleh partai-partai oposisi untuk tujuan politis. Mereka memanfaatkan sentimen agama untuk menjungkalkan nasib Gubernur petahana itu di Pilkada DKI Jakarta. Karakter atau jati diri Islam Indonesia adalah wasathiyah yang bersifat tawasuth,

tawazun dan ta'adul. Dalam terminologi kajian Islam di dunia internasional Islam wasathiyah sering diterjemahkan sebagai 'justly balanced Islam' atau 'Islam berkeseimbangan secara adil' atau juga 'middle path Islam' yang dikenal sebagai Islam jalan tengah'. Kebalikan wasathiyah adalah ekstrimisme (tatharruf) yang menurut pandangan Islam dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syari'ah. Tatharruf juga berlaku bagi orang yang melewati batas moderasi, pandangan mayoritas umat (ra'y al-jama'ah); dan juga bagi orang yang bertindak dalam norma dan praktek lazim sudah berlebihan.

Di lain pihak partai petahana menggandeng Ulama dari organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Perang media, argumen, bahkan hingga cacik-maki sangat mudah terlontar dari dua pihak yang bersaing demi memenangkan pemilu. Jika ditinjau dari segi sejarah, maka hubungan Islam dengan politik bukan sesuatu hal yang baru. Berdasarkan kajian terhadap sumber ajaran Islam al-Qur'an dan sunnah, setiap muslim meyakini bahwa kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan (the scheme of life) yang sangat jelas.

Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan.

Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam. Agaknya akan lebih memperjelas masalah dengan mengutip ungkapan yang ditulis oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam*, bahwa bukan hanya a system of theology, lebih dari itu Islam merupakan a complete civilization. Dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan. Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia,

melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami. Perjuangan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam Indonesia telah dimulai dengan upaya integralisasi nilai-nilai ajaran Islam sebagai ideologi politik umat Islam. Cita-cita mewujudkan ideologi politik Islam Indonesia dilakukan melalui partai politik Islam hingga berakhir pemerintahan Orde Lama.

Pemerintahan Orde Baru telah berhasil merubah pola pikir sebagian umat Islam yang berdampak pada melemahnya perjuangan politik umat Islam. Kebijakan ini melahirkan perubahan orientasi perjuangan umat Islam sebelumnya melalui partai politik dianggap tidak efektif lagi mewujudkan cita-cita politiknya, dan sekaligus menawarkan solusi alternatif menempatkan Islam sebagai sistem nilai tanpa harus menggunakan simbol keagamaan. Saat ini politisasi agama menjadi sangat viral akan tetapi bukan pada tatanan nilai melainkan sebatas tatanan simbol sehingga benih-benih pepecahan umat sangat terasa di masyarakat. Oleh karena itu Tulisan ini akan meninjau dinamika politik Islam di Indonesia.

Kajian Teori

Kehadiran Orde Baru sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai orde yang telah melahirkan upaya-upaya restrukturisasi perikehidupan bangsa baik dalam sosial, politik, budaya, ekonomi dan aspek lainnya. Slogan pembaharuan telah menjadi format politik baru. Namun, yang perlu dicatat bahwa pelanggaran isu pembaharuan (modernitas) memberi pengaruh yang cukup dalam di kalangan elite Islam. Apakah pembaharuan yang sedang bergulir menyertai dinamika pembangunan yang mengacu pada program oriented dan sikap pragmatis; atau akan berdampak positif bagi

Islam atau justru merupakan pukulan yang dahsyat yang mengancam eksistensinya.

Berdasarkan fakta sejarah, setelah mandegnya rehabilitasi Masyumi dan munculnya pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia serta semakin sempitnya ruang gerak partai Islam, meskipun tokoh-tokohnya pertama kali optimis namun pada gilirannya kalangan Islam banyak mengambil warna keras dalam merespon arus pembangunan dan modernisasi, akibatnya menempatkan umat Islam pada posisi marginal dalam pembangunan itu sendiri.

Sejalan dengan perkembangannya, sebetulnya telah terjadi arus baru di kalangan muda Islam Yogya dalam mengantisipasi persoalan Islam. Keadaan dipertanyakan secara kritis. Islam dan kelembagaannya dibicarakan secara cerdas. Walaupun di sana-sini menimbulkan tanggapan pro dan kontra, paling tidak didapatkan deskripsi bahwa sebagian masih dapat memahami orientasi politik dalam perjuangan Islam, sedangkan sebagian yang lain memandang orientasi tersebut perlu ditinjau kembali bahkan dirombak.

Kelompok terakhir menawarkan alternatif pemahaman Islam secara lebih mendasar dan proporsional dalam konteks kemasyarakatan, tidak terbatas pada orientasi politik bahkan orientasi politik dan implikasinya telah menimbulkan konflik yang serius sehingga menyudutkan umat Islam yang mayoritas menjadi veriferian dalam percaturan pembangunan. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Oleh karenanya, perlu dirumuskan secara memungkinkan umat Islam berperan sejajar dengan umat yang lain dalam pembangunan atau pada sudut pandang yang lain tidak menurunkan citra Islam sebagai agama.

Gerakan pemahaman Islam secara kritis dan empirik ini mendapatkan momentumnya pada awal tahun 70-an pada saat Nurcholis Madjid melontarkan gagasan "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", 3 Januari 1970. Dengan peran masmedia yang demikian intens, gagasan itu tersebar dengan cepat dan menyentak suasana yang telah terkondisi. Wajarlah jika reaksi dari berbagai

kalangan segera bermunculan baik yang pro dan kontra Muatan isi yang ditonjolkan oleh pemikiran baru itu adalah seputar liberalisasi pandangan, sekularisasi, kebebasan berpikir, *idea of progress*, inklusifisme, pemisahan Islam sebagai nilai dan partai Islam sebagai alat.

Eksistensi pemikiran awal tahun 70-an, di mana lingkaran Yogya dapat disebut sebagai induknya memberikan pengaruhnya tersendiri dan terjalin dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya. Sehingga sebagian pengamat memosisikannya sebagai gerakan reaktif terhadap corak perubahan sosial-politik yang sedang berlangsung. Tentu persoalannya tidak sesederhana itu, melainkan di samping akibat pengaruh gejolak budaya aktual, juga merupakan sintesa terhadap pola pemahaman sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa pola pembaharuan yang terjadi di Indonesia melalui fase puritanistik politis, ideologis, pendidikan dan sosial.

Pada tolok ukur tertentu diketahui bahwa pembaharuan sebelumnya dianggap telah gagal menghantarkan Islam ke pangkuan pemeluknya, kalah dalam mewujudkan cita-cita politiknya. Pada posisi lain dapat dinilai bahwa mereka telah berbuat dan juga berprestasi dalam konteks zamannya. Kembali pada pemahaman pada pembaharuan 70-an, terlepas dari terminologi yang digunakan, yang dianggap kurang tepat oleh sementara kalangan dan Nurcholish Madjid sendiri menyadari bahwa terminologi yang dipakai memang kontroversial dan menganjurkan pemakaian istilah teknis yang lebih tepat dan netral. Secara substansial gerakan itu telah menawarkan landasan-landasan dasar dalam kerangka mengembalikan daya gerak psikologis (*psycholo-striking force*) umat Islam melalui titik pandang yang realistik; tidak apologetik.

Arah yang menjadi bidikannya paling tidak tercermin pada analisis bahwa supaya umat Islam tidak dapat mengenali dan mengarahkan gejala-gejala modernitas, tidak terasing dari padanya dan tidak lagi berada pada posisi marginal dalam dinamika pembangunan, khususnya ikut dan melakukan pengambilan kebijakan politik bangsa. Untuk ke arah itu

diperlukan prasyarat dasar berupa pembenahan-kalau tidak perombakan pola-pola pandang, kebebasan berpikir, keterbukaan sikap dan meletakkan Islam menjadi membumi sebagai sistem nilai.

Metode Penelitian

Metode penulisan ialah kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif akan menjelaskan secara rinci dalam perkembangan politik islam di indonesia. Sumber data ialah Sekunder yang bersumber dari bahanbacaan seperti jurnal, buku yang relevan membahs dan mengups secara jelas tentang politik dan islam di indonesia. Teknik analisis ialah triangulasi. Yang dimulai dengan mengumpulkan bahan atau sumber data kemudian dilakukan pemilihan data untuk dijadikan sumber utama dalam penulisan naskah ini, kemudian dilakukan penyuntingan untuk menyusun sebuah analisis lengkap dengan bentuk kalimat naaratif tentang politik dan islam di indonesia, sehingga terakhir bisa ditarik kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Islam Dan Politik Orde Lama

Sebagai dasar pemikiran, dalam kitabnya al-Siyasah al-Syar'iyah, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh. Muhammad Asad berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran Islam tentang sosio-politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi. Untuk mewujudkan cita-cita itu memerlukan perjuangan dan perjalanan

yang panjang. Ini telah dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Sebab disadari sekali bahwa perjuangan melawan segala bentuk kezaliman merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Prinsip ini diyakini benar oleh umat Islam sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar akan dapat diterapkan dengan baik. Oleh karena itu sangat wajar sekali bila dikatakan umat Islam Indonesia dikenal sebagai penantang-penantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme.

Para pemimpin umat Islam yang tergabung dalam berbagai partai politik membangun semangat kebangsaan yang tetap dilandasi benang merah Islam. Warna perjuangan dalam membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentu tidak harus terhenti setelah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

Sebagai suatu bangsa yang majemuk-bukan hanya dalam bentuk perbedaan suku dan adat namun yang lebih serius adalah pada dataran perbedaan keyakinan dan agama-tentu menimbulkan berbagai perbedaan kehendak dalam mewarnai bangsa dan negara tentu munculnya berbagai pergumulan antarasesama anak bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan agama. Bagi umat Islam, negara yang ingin dibentuk tentu berdasarkan ajaran Islam, dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam konstitusi negara. Inilah tema sentral yang diperjuangkan oleh para pemimpin Islam di Indonesia yang pertama ketika menjelang proklamasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan.

Berakhirnya masa penjajahan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Isu yang paling asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia melalui para pemimpin berupaya konsisten terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai

Islam termaktub dalam konstitusi negara. Berawal dari perjuangan gigih dalam panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno dengan melahirkan “Piagam Jakarta” yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Isu ini mencapai klimaksnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante hasil pemilu I tahun 1955. Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai deskripsi fakta sejarah bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini.

Islam dan Politik Masa Orde Baru

Orde Baru sebagai satu babak sejarah dari mata rantai sejarah Indonesia tidaklah luput dari filosofi sejarah pada umumnya, yakni berada pada kisaran hukum refleksi, dan interaksi dialeksi. Ini berarti orde baru, di samping merupakan perwujudan aksi-reaksi masyarakat yang terawetkan terhadap problem aktual, memberikan getaran timbal balik pada kehidupan manusia dalam perspektif kulturalnya, juga merupakan antitesa terhadap.

Harus diakui Orde Baru telah melahirkan optimisme, pranata dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri. Lahirnya orde Baru di pertengahan tahun 1966 yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai orde pembangunan, telah membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan bangsa, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Dalam bidang politik, perubahan itu terjadi dengan adanya mekanisme perwujudan partisipasi politik rakyat dan penyegaran kepemimpinan nasional yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Berikutnya, pada tahun 1973 telah dilakukan penyederhanaan partai melalui fusi, dari 10 partai menjadi 3 partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam,

NU, Permusi, PSII dan Perti; Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI; Golongan Karya (Golkar).

Tidak satupun dari ketiga parpol itu yang membawa nama agama atau ideologi kultural lainnya. Bahkan satu-satunya partai yang mengusung Islam, PPP, harus merelakan identitas keislamannya hilang. Padahal identitas keislamannya itulah menjadi kekuatan PPP. Rekayasa partai politik ini diikuti juga dengan kebijaksanaan masa mengambang (floating mass) yang membatasi kegiatan politiknya di Daerah Tingkat II ke atas; dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi parpol (1983) dan Ormas (1985).

Pemerintah dengan semua rekayasannya itu adalah bagian penting dari apa yang disebut dengan birokratisasi, yakni keterlibatan pemerintah terhadap seluruh aktifitas rakyat. Hal ini sebenarnya merupakan suatu perwujudan dari obsesi pemerintah yang didominasi ABRI (sekarang berubah menjadi TNI dan POLRI) dalam rangka mewujudkan ketertiban dan stabilitas nasional sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan secara lancar dan penuh perhatian. Di awal kelahirannya, Orde Baru sangat menguntungkan Islam, karena muncul orde baru ini berarti telah melenyapkan orde lama dan gerakan Soekarnoisme yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai yang anti agama.

Kenyataannya dapat dicermati dengan banyaknya dukungan dari parpol-parpol, ormas-ormas Islam kepada Orde Baru. Meskipun demikian, tidak semua keinginan kelompok Islam dapat dikabulkan. Seperti diketahui, bahwa pada awal kelahiran Orde Baru dan Tokoh Masyumi memperjuangkan agar tokoh-tokoh mereka yang masih ditahan Orde Lama segera dilepaskan dan Partai Masyumi sendiri direhabilitir, tetapi apa yang menjadi tuntutan itu tidak dapat dikabulkan. Demikian pula dengan Bung Hatta yang akan mendirikan Parta Demokrasi Islam. Sebagai jalan keluarnya dibentuklah Partai Muslimin Indonesia (Permusi) yang diharapkan dapat menjadi

penjelmaan dari partai Masyumi yang telah dilarang. Namun pemerintah menginginkan agar partai tersebut menjadi partai baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan partai Masyumi, bahkan para bekas tokoh-tokoh Masyumi pun tidak diperbolehkan memimpin partai baru tersebut.

Dalam Pemilu pertama sejak Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1971, partai-partai Islam hanya mendapatkan suara sekitar 29% dan Perti hanya 0,7%. Sedangkan Golkar memperoleh suara 62,8%, PNI 6,4%, Perkindo dan Partai Katholik 2, 45%. Kemudian dapat dicatat bahwa kelahiran PPP sebagai fusi dari Partai-Partai Islam pada tahun 1973 sebenarnya tidaklah sederhana. Fusi bukanlah ide dari pemimpin partai, melainkan berasal dari pemerintah dan meskipun para pemimpin partai dari keempat partai tersebut sudah bersepakat untuk meleburkan diri dalam sebuah partai yang disebut atau diberi nama PPP, namun latar belakang kulturalnya yang berbeda tetap menjadi faktor potensial bagi perpecahan, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu, yakni ketika PSII yang kemudian disusul oleh NU memisahkan diri dari Masyumi. Ternyata kekompakan itu hanya bertahan sampai tahun 1973 sampai menjelang pemilu tahun 1982.

Pada gilirannya, sejarah telah membuktikan menjelang Pemilu tahun 1982 semakin nampak perbedaan yang tajam antara unsur-unsur dalam tubuh PPP semakin nampak. Faktor utama penyebabnya, karena J. Naro yang menggeser calon-calon dari unsur NU dalam daftar calon anggota DPR. Sikap yang membawa kekacauan dalam tubuh partai politik telah mengakibatkan berkurangnya jumlah kursi PPP di DPR yakni sebanyak 6 kursi dibandingkan dari jumlah kursi yang diperoleh pada tahun 1977 yang memperoleh 99 kursi. Sejak inilah PPP berada dalam posisi yang semakin tidak menentu dengan adanya sikap otoriter yang ditampilkan J. Naro terhadap setiap pimpinan partai yang berbeda dengannya. Bukan itu saja, sikap

otoriter itu juga diterapkan terhadap mereka yang berasal dari unsur yang sama dengan dirinya (Permusi), bila perbedaan yang mereka munculkan. Sikap ini berdampak tidak menguntungkan partai, yang dapat dilihat dari hasil Pemilu tahun 1987 dengan perolehan PPP hanya 61 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jadi meskipun pada awalnya Orde Baru itu memberikan peluang dan posisi memungkinkan bagi umat Islam untuk memperkuat dan menentukan sikap politiknya, namun pada perjalanannya telah dikacaukan oleh munculnya ambisius kelompok dan pribadi. Makanya orientasi politik dan implementasinya oleh umat Islam telah menimbulkan konflik internal yang serius, sehingga menyudutkan umat yang mayoritas menjadi veriferian dalam percaturan pembangunan secara nasional.

Komitmen orde baru terhadap program pembangunan bangsa Indonesia melalui partai Islam dirasakan begitu besar. Akan tetapi arah dan bentuk pembangunan "ideal" yang akan dilaksanakan di masa akan datang masih terjadi perbedaan pandangan di awal masa Orde Baru. Fenomena ini sangat beralasan, karena pada saat itu para birokrat dan teknokrat banyak yang berlatar belakang pendidikan sekular dan kultur priyayi-abangan. Dampaknya terlihat pada corak pembangunan yang dilaksanakan lebih berwatak modernisasi yang kebarat-baratan (*westernized*). Warna ini menjadikan umat Islam termasuk para tokoh modernismenya melihat modernisasi ini penuh dengan kecurigaan, bahkan menentanginya.

Sehingga seringkali umat Islam menjadi sasaran kritik dari pihak pemerintah dengan klaim bahwa Islam anti pembangunan, anti modern, anti Pancasila dan seterusnya. Ini terjadi karena gerakan modernisme Islam di awal masa ini sampai awal orde baru sebenarnya lebih merupakan gerakan pemurnian Islam dari pada gerakan yang menekankan bagaimana meningkatkan kualitas umat Islam dan memahami ajaran-ajaran Islam agar dapat merespon perkembangan kehidupan yang ada.

Pemikiran yang muncul dari Masyumi misalnya

tentang politik, ternyata itu hanya merupakan pemikiran yang ditransfer dari Barat dengan bungkus Islam. Deliar Noer sebagai tokoh Islam pertama secara terbuka mengatakan bahwa modernisasi itu tidak bertentangan dengan Islam, melainkan menjadi suatu keharusan. Pernyataan ini kemudian diikuti oleh Nurcholish Madjid, yang dalam beberapa hal justru mempunyai jangkauan pemikiran lebih jauh seperti pendapatnya bahwa langkah utama untuk melakukan modernisasi bagi umat Islam harus dengan menciptakan iklim yang liberalistik.

Salah satu bagian dari proses ini adalah apa yang diistilahkan dengan sekularisasi yang berbeda dengan istilah baku.¹Setelah munculnya dua pemikiran ini, kemudian diikuti pula dengan munculnya pola-pola pemikiran baru ini, dikotomi tradisional-modernis tidak terlihat lagi bahkan menjadi semakin pudar. Pemikir-pemikir lainnya, terutama muncul pada dekade tahun 80-an, yang kemudian menurut Fachry Ali dan Bachtiar Effendi diklasifikasikan menjadi empat pola utama, yakni: Neo-modernisme dengan tokohnya Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Majdid, Sosialisme Demokrasi Islam dengan tokohnya M. Dawam Raharjo dan Adi Sasono, Universalisme dengan tokohnya Jalaluddin Rahmat dan AM. Saefuddin, Modernisme dengan tokohnya Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Djohan Effendi.

Sejalan dengan adanya pembaharuan pemikiran, telah terjadi pula perubahan orientasi organisasi dari para pemimpin Islam. Sebelumnya format perjuangan Islam lebih difokuskan melalui jalur politik, dalam perkembangan selanjutnya format perjuangan meliputi bidang yang lebih luas dan konkrit, terutama upaya-upaya untuk membebaskan umat Islam dari kebodohan dan kemiskinan. Dahulu ormas-ormas Islam dengan segenap *underbow*-nya lebih berperan sebagai penggalang masa dan pemimpinnya berorientasi pada politik praktis seperti menjadi anggota DPR, dan kalau bergerak di bidang pendidikan atau sosial misalnya itupun hanya terbatas, maka pada saat ini ormas-ormas itu berperan untuk membina umat dalam bidang yang lebih luas.

Untuk melaksanakan program pembinaan ini secara efektif, Muhammadiyah misalnya, telah membentuk badan-badan otonom yang terdiri dari Majelis Ekonomi, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih. Di samping program pembinaan yang

dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang berskala nasional, kini telah tumbuh yayasan-yayasan, lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat yang bersifat lokal, di samping adanya individu-individu yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat yang tidak menggunakan simbol Islam, tetapi mereka tetap peduli terhadap pelembagaan Islam. Kemudian di sisi lain, perubahan orientasi ini membawa konsekuensi adanya diversifikasi kepemimpinan umat Islam yang kini terdiri dari ulama, tokoh-tokoh organisasi Islam, intelektual muslim dan pejabat negara di bidang agama Islam.

Meskipun pada saat ini terjadi depolitisasi Islam atau kemuduran politik Islam secara institusional serta kekuatan tawar menawar (*bergaining power*) para pemimpin Islam, akan tetapi tidak hanya berlangsung di lingkungan masyarakat yang secara tradisional memang mentaati Islam (santri), melainkan juga menembus ke universitas-universitas, kantor-kantor swasta dan birokrasi pemerintah, yang disertai dengan semakin banyaknya serana-sarana ibadah di sekitar mereka.

Penyaluran aspirasi umat Islam kemudian mengalami perubahan. Kalau pada masa lalu, PPP dianggap sebagai satu-satunya sarana penyaluran aspirasi umat Islam, maka pada saat ini aspirasi itu bisa disalurkan juga melalui, PKS, PBR, PKB, PAN, PBB dan partai-partai lainnya termasuk partai lokal khusus di Nanggroe Aceh Darussalam yang lahir setelah perjanjian damai Helsinki. Persoalannya, apakah penyaluran itu dapat dilayani dan disalurkan oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya kepada umat Islam, atau sekedar membudayakan Islam yang selalu dianggap identik dengan kultur atau budaya modern yang selalu ditemukan berada bahkan kontras dengan nilai-nilai Islam.

Kenyataan di atas mengidentifikasi bahwa tantangan yang dihadapi umat Islam semakin variatif, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sementara persoalan-persoalan traumatis pun belum dapat dihilangkan seluruhnya, yang menurut Aswab Mahasin adalah benturan antara tradisionalisme dan modernisme, antara ikatan-ikatan keagamaan dan kebangsaan, dan antara santri dan abangan. Tantangan eksternal yang tak bisa

dilakkan adalah cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang kuat pengaruhnya terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang semakin sekular.

Sementara tingkat pendidikan umat masih rata-rata rendah, dan dinamika pemahaman Islam yang mengalami kelambanan dibandingkan dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Demikian pula akulturasi budaya yang semakin mengaburkan bahkan tidak hanya nilai peradaban bangsa, melainkan juga memarginalkan umat Islam dari nilai Islam yang benar. Meskipun arus *back to Islam* semakin deras, namun upaya penerimaan dan penyesuaian secara jujur jauh dari yang diharapkan. Pada sisi lain, upaya-upaya penyebaran agama nonIslam (*proses kristenisasi*) dengan berbagai cara sejak dua dasawarsa ini mengalami kemajuan.

Kenyataan ini tentu berdampak pada berkurangnya jumlah umat Islam, setidaknya memperlamban upaya memahami nilaikeislaman bagi masyarakat karena umat Islam terjebak dengan sistem toleransi beragama dan kerjasama yang mereka galang.

Islam dan politik saat ini

Ide “NKRI Bersyariah” ramai dibicarakan dalam beberapa waktu belakangan, dan kerap digunakan sebagai bagian dari strategi politik yang memanfaatkan sentimen Islam menjelang Pemilu 2019. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia. Pemanfaatan sentimen agama dalam kontestasi politik di antaranya tampak pada aktivitas kampanye yang menyerang kepercayaan lawan politik atau menyebarkan pidato kebencian dan ancaman berbau agama melalui khotbah para pemuka agama.

Reformasi yang terjadi tahun 1998 membuka peluang bagi beberapa kelompok muslim dan partai politik untuk mengusulkan pengenalan syariah ke dalam konstitusi dengan meminta

perubahan pada Pasal 29 UUD 1945 yang akan memberikan dasar untuk praktik syariah bagi umat Islam. Beberapa kelompok bahkan melangkah lebih jauh dengan mengusulkan bahwa Indonesia menjadi negara Islam.

Meskipun kelompok-kelompok itu memiliki perbedaan pendapat, strategi, dan tujuan, mereka memiliki pandangan yang sama, bahwa syariah harus berkontribusi pada reformasi konstitusi di Indonesia. Meski sejarah memperlihatkan bahwa pendekatan formalisasi syariah telah gagal memengaruhi proses reformasi konstitusional, namun gerakan-gerakan untuk mengusung model semacam ini masih hidup hingga saat ini. Sementara ada kelompok yang mengklaim menerima kenyataan bahwa NKRI bukan negara Islam, tetapi mereka juga mengusulkan untuk berdirinya “NKRI Bersyariah”.

Gagasan “NKRI Bersyariah” sebagai sebuah jargon politik karena negara sebenarnya telah mengakomodasi syariah. Ada ruang untuk agama di ruang publik, tetapi ada juga keterbatasan di saat yang sama. “Gagasan “NKRI Bersyariah” adalah jargon politik yang mengeksploitasi emosi umat. Seperti halnya kelompok mayoritas lainnya di masyarakat mana pun, muslim Indonesia menurutnya harus belajar bagaimana melindungi kelompok minoritas. Di bawah pendekatan ini, fleksibilitas hukum Islam dijamin, dan hak-hak konstitusional warga negara dijamin. Ini adalah cara yang signifikan untuk menunjukkan bahwa kecocokan syariah dan konstitusionalisme tidak mengarah pada kekacauan politik atau menimbulkan kerugian pada masyarakat, sebagai gantinya ia melindungi kepentingan umum sebagai tujuan utama syariah.

Memang benar bahwa demokrasi didasarkan pada mayoritas, tetapi kita juga memiliki konstitusi yang melindungi hak-hak minoritas dan membatasi kemampuan mayoritas untuk beroperasi sesuai keinginan. Berdasarkan informasi yang berkembang saat itu, Jokowi telah mendaftar 10 calon wakil presiden. Ada

yang dari partai politik maupun non partai politik. Terjadi tarik menarik kepentingan dari partai politik pendukung Jokowi untuk menyodorkan calon wakil presiden dari partainya. Hal yang sama terjadi di kubu Prabowo. Dalam kondisi demikian, kedua kubu berusaha mencari alternatif calon wakil presiden dariluar parpol. Lalu muncul Ijtima'Ulama di Jakarta yang menyodorkan nama Ustadz Abdul Somaddan Habib Salim Assegaf sebagai calon wakil presiden Prabowo. Nama itu muncul atasusulan Habib Rizieq Syihab yang berada di Makkah.

Seketika dunia politik Indonesiaguncang. Tak disangkanama Ustadz Abdul Somad (UAS) muncul ke permukaan. Terlebih lagi, sambutan masyarakat sangat antusias. Dukungan agar ustadz asal Pekanbaru Riau maju muncul di mana-mana. Mereka berharap ustadz yang dikenal lugas ini mau menjadi pemimpin negeri ini. Bahkan banyak tokoh mencoba melobi agar yang bersangkutan mau menerima pinangan kubu Prabowo. Kemunculan UAS ini membuat kubu Jokowi pun menyiapkan strategi. Tokoh Islam harus dilawan dengan tokoh Islam pula. Muncul nama Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ternyata UAS tak bersedia mendampingi Prabowo. Sehari menjelang penutupan pendaftaran, muncul nama Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai calon wakil presiden kubu Prabowo. Nama ini pun tak diduga, karena banyak orang mengira kubu Prabowo akan mencari tokoh umat Islam sebagaimana yang diamanatkan oleh Ijtima' Ulama. Sebelum nama Sandiaga muncul, kubu Prabowo telah menawarkan kepada Anies Baswedan, tapi yang bersangkutan menolak. Menghadapi rivalitas tersebut, kubu Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Prof Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan penunjukan Mahfud bisa dibilang sudah 99 persen. Pakar hukum ini sudah diminta mengukur baju untuk persiapan deklarasi. Bahkan, ia sudah di sekitar Istana menjelang

deklarasi berlangsung. Namun Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, terpilihnya Ma'ruf Amin sebagaicalon wakil presiden akan mampu mengunci isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mungkin sudah dipersiapkan kelompok lawan untuk menyerang Jokowi.

Simpulan

Indonesia bukanlah negara agama. Sedangkan keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan. Jika yang disaksikan selama ini terjadi, dimana banyak oknum pejabat yang melakukan tindakan korupsi, maka hal itu tidak serta merta dapat disebut sebagai tindakan sekuleristik, tetapi lebih tepat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang tidak lain merupakan amanah yang seharusnya dijalankan secara konsekuen dan bertanggung jawab.

Masyarakat pemilih—khususnya di Indonesia memiliki sensitivitas agama yang cukup tinggi, sehingga mudah dipengaruhi jika menggunakan isu-isu agama. Dengan warna keagamaan yang sama, diharapkan pendekatan mobilisasi pemilih dapat digunakan dengan mudah. Sentimen primordial dapat dijadikan metode kampanye yang efektif untuk mengeruk suara. Maka tidak heran jika para kandidat lebih cenderung terfokus memobilisasi calon pemilih yang menganut agama yang sama dengan dirinya. Seorang kandidat sebisa mungkin menjadikan dirinya serupa dan sesuai dengan emosi agama para pemilih.

Fenomena tersebut semakin menegaskan bahwa agama masih tetap menjadi suatu yang menarik untuk dijadikan “dagangan politik” atau setidaknya dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang jitu untuk meraih simpati masyarakat, sehingga dengan demikian dapat meraih dan mengantongi suara mereka.

Fenomena ini sudah Mewabah setiap kali menjelang suksesi dan telah menjadi hal yang lumrah. Hal ini membuktikan bahwa strategi tersebut cukup efektif, sehingga pada periode selanjutnya mereka pun menerapkan metode yang sama.

Agama memuat aturan-aturan yang bersifat normatif. Agama selayaknya berfungsi menafsirkan hidup dan mengarahkan memiliki fungsi interpretatif dan fungsi etis. Dalam Perspektif ini, agama tidak hanyut dan tenggelam dalam politik, dan politik pun tidak memeralat agama. Fungsi interpretatif dan fungsi etis hanya mungkin dijalankan kalau agama dan politik tidak dicampuradukkan. Dalam situasi seperti itu, interaksi antara agama dan politik akan menekankan dinamisme dan perubahan yang dituju, sehingga kehidupan bersama akan lebih manusiawi karena lebih merdeka dan lebih adil. Tanpa dua fungsi ini, agama akan mudah menjadi legitimasi atau diperalat oleh praktik politik atau praktik ekonomi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sampai saat ini, agama tetap menjadi sesuatu yang selalu bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang salah satunya adalah politik. Karena itu pula, agama seringkali dijadikan sebagai “dagangan” politik, utamanya ketika menjelang suksesi kepemimpinan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif yang tujuan akhirnya adalah untuk meraih simpati konstituen agar memberikan suara kepada seseorang calon pemimpin. Perilaku tersebut tentu tidak sepenuhnya salah, sebab logikanya, untuk melakukan pendekatan kepada individu atau kelompok lain, maka harus mengikuti irama dan selera mereka, supaya maksud dan tujuan seorang kandidat dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, yang perlu ditegaskan adalah perilaku menjadikan agama sebagai dagangan politik haruslah dilakukan secara bertanggung jawab dalam arti yang sesungguhnya.

Oleh sebab itu, konsistensi antara apa yang telah dinarasikan secara verbal dengan realitas faktual sangatlah diperlukan, apalagi penarasian terhadap masyarakat yang kerap menggunakan simbol-simbol dan jargon-jargon yang dikutip dari ajaran agama, karena itu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sosok pemimpin. Lebih dari itu, konsistensi merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama yang sebelumnya, telah digunakan atau diperalat dengan menggunakan simbol-simbolnya untuk meraih simpati masyarakat, karena sangat bersesuaian dengan *Spirit Of Religious Values*.

Bagaimana pun jabatan yang diraih, hakikatnya adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah. Jika para pemimpin sudah mempercayai dan meyakini bahwa jabatan adalah amanah, maka perilaku menyimpang tidak akan terjadi lagi. Dengan begitu, berarti manusia telah menaikkan harkat dan martabat agama sebagai sesuatu yang agung dan meletakkan signifikansinya di tempat yang lebih tinggi, karena memang di situlah tempatnya. Dan hal yang sangat dikhawatirkan ketika identitas Islam Indonesia yang terkenal dengan Islam Tawashut-nya berubah mengalami degradasi menjadi Islam Tatharruf, oleh karena itu seyogyanya Islam dijadikan pondasi atau landasan berpolitik dengan nilai-nilai kebaikan yang universal bukan sebaliknya hanya sebatas politisasi Islam.

Referensi

- Abdillah, Masykuri. 2011. *Islam dan Dinamika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Fachry dan Efendi, Bachtiar. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Ananda, Basri. 1985. *Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektulisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Pelita.
- Azra, Azyumardi, 2002. *Jaringan Global Dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung:

- Mizan.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, Azyumardi. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Azra, Azyumardi. 2017. *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*. Jakarta: Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah.
- Bahason, Awad. 1984. *Massa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*.
- Bizawie, Zainul Milal. 2016. *Masterpiece Islam Nusantara; Sanad dan Jejaring Ulama-Santri*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Ma'arif, A. Syafi'i. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES. Madjid, Nurcholish. 1987. *Islam Komedernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Mahasin, Aswab. 1984. "Marhaban", dalam *Prisma*.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Pranowo, M. Bambang. 2009. *Memahami Islam Jawa*. Tangerang: Pustaka Alvabet dan Indonesia Institute for Society Empowerment (INSEP).
- Rais, Amin. 1987. *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan.
- Taimiyah, Ibnu. 1952. *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi
- Taimiyah, Ibnu. 1963. *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh: Matabi' al-Riyadh*.
- Tamara, Nasir. 1988. "Sejarah Politik Islam Orde Baru", *Prisma*, No. 5 Thn.inklusi
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Afabeta.
- Theore, A. C., & James, H. W. (1990). *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. USA: Prentice Hall Inc.
- What Is Sister City ?* (2022, Desember 14). Diambil kembali dari Sister Cities International: <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>
- Winatra, D. R. (2019). *Paradiplomasi : Alasan Kota Bandung Melakukan Kerjasama SIster City Dengan Kota Namur (Belgia)*.